



BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Tahun 2020 disusun sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja yang memuat Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang disertai dengan target kinerja.

Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2020 Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya mengacu pada sasaran Visi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2020-2024 yakni “Terwujudnya Masyarakat Surabaya yang Terlindungi dan Terselamatkan dari Kejahatan Narkoba”. Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja.

Capaian kinerja / Nilai Kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2020 adalah 85,86% dari target nilai 88% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 95,23 sebagaimana tertuang dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dashboard BNN Kota Surabaya pada Aplikasi SMART DJA Kemenkeu TA. 2020.

Serapan anggaran BNN Kota Surabaya TA. 2020 sebesar sebesar Rp. 1.952.322.337,- atau sebesar 99,28% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.966.481.000,- dan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 14.158.663,- atau sebesar 0,72%. Pada awal tahun anggaran 2020 BNN Kota Surabaya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.066.489.000,- namun pada bulan April 2020 terdapat penghematan belanja sebesar Rp. 100.008.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 1.966.481.000,-. Pagu anggaran BNN Kota Surabaya tersebut untuk mendukung target dan tercapainya 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja yang terbagi dalam 2 (dua) program yakni :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan terdiri 1 (satu) indikator kinerja
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) terdapat 7 (tujuh) sasaran kegiatan terdiri 7 (tujuh) indikator kinerja.

Diharapkan pada tahun berikutnya, seluruh kegiatan BNN Kota Surabaya dapat lebih mencapai sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta mencapai out come yang maksimal dan sesuai harapan masyarakat Surabaya.

KATA PENGANTAR

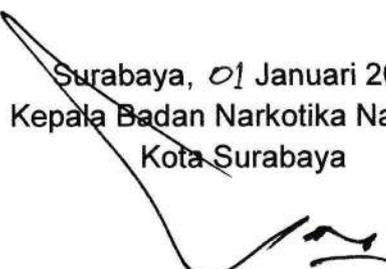
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan usaha maksimal yang telah dilakukan Pejabat / Staf Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dan kerjasama yang baik, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya tahun 2020 dapat disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pertanggungjawaban Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2020.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya 2020 disampaikan sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang ditargetkan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan capaian dari target tersebut serta disampaikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mencapai target kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.

Kami menyadari bahwa diperlukan komitmen, kerja keras, dan kerjasama segenap jajaran di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dan dukungan dari pihak terkait dalam rangka mencapai target kinerja dan sasaran strategis guna mewujudkan visi dan misi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat sebagai media evaluasi dan mewakili atas penilaian pelaksanaan kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2020. Atas peran serta dan kerja keras seluruh pejabat dan staf Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya selama tahun 2020 yang telah memungkinkan terlaksananya tugas dan fungsi yang diemban diucapkan banyak terima kasih. Kami menyadari dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya masih belum sempurna, oleh karenanya kami sangat berharap saran dan kritik dari semua pihak yang peduli.

Surabaya, 01 Januari 2021
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Surabaya


H. Kartono, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Eksekutif	i
2. Kata Pengantar	ii
3. Daftar Isi	iii
4. BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	2
D. Struktur Organisasi	2
E. Sistematika Penyajian	4
5. BAB II, PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	5
B. Perjanjian Kinerja	5
6. BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA BNN KOTA SURABAYA	
A. Capaian Kinerja BNN Kota Surabaya	8
A.1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyebarluasan Informasi P4GN	9
A.2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kebijakan Institusi / Lembaga yang Responsif dalam Penanganan Permasalahan Narkoba	11
A.3. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Penguatan Kapasitas pada Institusi dan Lingkungan Masyarakat dala Upaya Penanganan Narkoba	14
A.4. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Narkoba pada Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah yang Memadai	19
A.5. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Narkoba pada Fasilitas Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang Memadai	21
A.6. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Pascaehabilitasi Narkoba yang Terintegrasi dan Berkesinambungan	24
A.7. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	27
A.8. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Proses Manajemen Kinerja yang Efektif dan Efesien	31
B. Realisasi Anggaran	33
7. BAB IV, PENUTUP	34
8. BAB V, LAMPIRAN – LAMPIRAN	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, telah ditetapkan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut salah satunya mengatur mengenai kelembagaan Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.

BNN sebagai lembaga vertikal, memiliki perwakilan di daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota, termasuk BNN Kota Surabaya.

BNN Kota Surabaya sebagai lembaga pemerintah di bawah BNN RI wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden melalui BNN Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN Kota Surabaya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Presiden RI nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

- Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala BNN RI nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala BNN RI nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kab/Kota;
 8. Keputusan Kepala BNN RI nomor 388 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya adalah Lembaga Pemerintah vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

2. Tugas

Melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam Wilayah Kota Surabaya.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kota Surabaya menyelenggarakan fungsi :

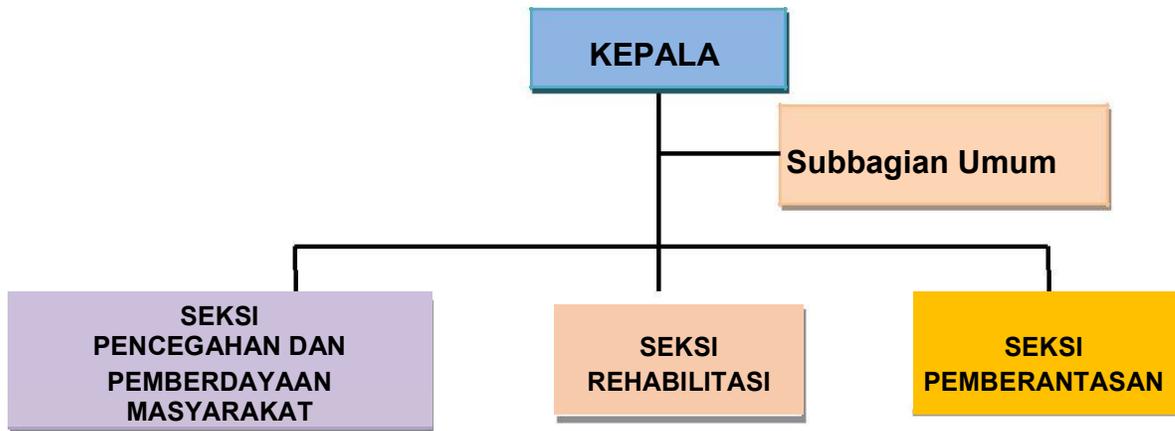
- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan bidang P4GN di wilayah Kota Surabaya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Surabaya;
- c. Melaksanakan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kota Surabaya;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Surabaya;
- e. Pelayanan administrasi dan Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan BNN Kota Surabaya.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BNN Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNN RI nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kab/Kota adalah :

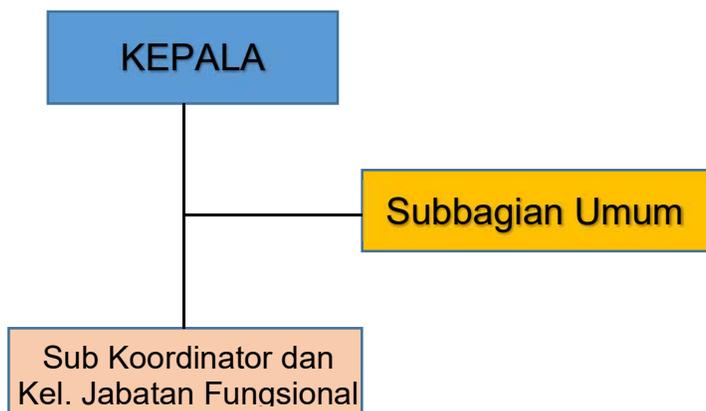
1. Kepala;
2. Subbagian Umum;
3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Seksi Rehabilitasi; dan
5. Seksi Pemberantasan.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA



Namun dalam perkembangannya mulai 1 Desember 2020 Struktur Organisasi BNN Kota Surabaya mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota dan dilantiknya pejabat fungsional, Struktur organisasi BNN Kota Surabaya menjadi sebagaimana berikut :

1. Kepala
2. Sub Bagian umum
3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNN Kota Surabaya, antara lain Latar belakang, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi BNN.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan sebagai berikut :

a. Capaian kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

b. Realisasi anggaran

pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab V LAMPIRAN

a. Perjanjian kinerja

b. Data dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

c. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.

Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN RI di daerah dalam penanganan permasalahan narkoba memiliki visi sebagai berikut :

VISI	“Terwujudnya Masyarakat Surabaya yang Terlindungi dan Terselamatkan dari Kejahatan Narkoba”
-------------	---

Misi yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya adalah :

MISI	<ol style="list-style-type: none">1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Professional di Surabaya2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat Surabaya terhadap Kejahatan Narkoba3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan
-------------	---

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah / lembaga yang menerima amanah / tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan prgotam/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja berisikan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui kegiatan yang ada pada lembaga / instansi yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja BNN Kota Surabaya tahun anggaran 2020 ada 8 (delapan) indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini :

SASARAN KEGIATAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsive dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi / lembaga yang responsive terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti Narkoba	2	Institusi / Lembaga
Terselenggaranya penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi / lingkungan yang turut berpartisipasi dalam progam pemberdayaan Anti narkoba	8	Instansi / Lingkungan
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik pemerintah yang operasional	2	Fasilitas
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik Komponen Masyarakat yang operasional	4	Fasilitas
Terselenggaranya Pelayanan Pascarehabilitasi Narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah Penyalah guna, Korban Penyalah guna, dan Pecandu Narkoba yang menjalani layanan Pascarehabilitasi	20	Orang
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana Narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana Narkotika yang Diselesaikan	2	Berkas
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88	%

Untuk mencapai Perjanjian Kinerja tahun 2020 BNN Kota Surabaya mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.966.481.000,-, yang pada awal tahun DIPA BNN Kota Surabaya sebesar Rp. 2.066.489.000,- sesuai DIPA nomor : SP DIPA-066.01.2.689601/2020 tanggal 12 November 2019. Namun pada bulan April 2020 terdapat penghematan sebesar Rp. 100.008.000,- sehingga pagu anggaran BNN Kota Surabaya menjadi sebesar Rp. 1.966.481.000,-. Penghematan belanja tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kepala BNN RI nomor : SE/44/IV/KA/PR.01/BNN/2020 tentang Penyesuaian / Penghematan Belanja dalam rangka Pelaksanaan APBN Tahun 2020 di Lingkungan BNN. DIPA BNN Kota Surabaya terbagi dalam 2 (dua) program sebagaimana program BNN yakni :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BNN KOTA SURABAYA

A. CAPAIAN KINERJA BNN KOTA SURABAYA

Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya dalam melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya serta Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba guna mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya antara lain perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang berkualitas.

Pada Tahun 2020 BNN Kota Surabaya telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan rincian : 8 (delapan) sasaran kegiatan yang terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja. Tabel berikut menjelaskan target sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta capaian dari target yang ditetapkan :

SASARAN KEGIATAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7%	8,59%	122,7%
Meningkatnya kebijakan institusi / lembaga yang responsive dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi / lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti Narkoba	2 Institusi / Lembaga	6 Lembaga	300%
Terselenggaranya penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam prog. pemberdayaan Anti narkoba	8 Instansi / Lingkungan	8 Instansi/ Lingk	100%
Terselenggaranya pel. rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik pemerintah yang operasional	2 Fasilitas	2 Fasilitas	100%
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik Komponen Masyarakat yang operasional	4 Fasilitas	5 Fasilitas	125%
Terselenggaranya Pelayanan Pascarehabilitasi Narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah Penyalah guna, Korban Penyalah guna, dan Pecandu Narkoba menjalani layanan Pascarehabilitasi	20 Orang	20 Orang	100%
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana Narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana Narkotika yang Diselesaikan	2 Berkas	9 Berkas	450%
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88%	85,86%	97,57%

Dari 8 (delapan) indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 indikator kinerja dengan capaian sesuai dengan target yang ditentukan, 4 indikator kinerja dengan capaian melebihi dari target yang ditentukan dan 1 indikator kinerja dengan capaian kurang dari target yang ditentukan.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di lingkungan BNN Kota Surabaya selama tahun 2020, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target dan capaian kinerja tahun berjalan, membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. Berikut disajikan capaian masing-masing Indikator Kinerja tahun 2020 BNN Kota Surabaya sebagaimana berikut :

1	Sasaran kegiatan : Meningkatkannya Penyebarluasan Informasi P4GN
----------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1	Persentase masyarakat yang terpapar Informasi P4GN	7%	8,59%	122,7%

Total penduduk Kota Surabaya tahun 2020 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekitar 3.095.026 jiwa. Target nasional yang harus dicapai yaitu 7% sekitar 216.651 penduduk yang terpapar informasi P4GN di Kota Surabaya. Sedangkan realisasinya BNN Kota Surabaya bisa mencapai 8,59% yaitu sekitar 265.968 penduduk yang sudah terpapar informasi P4GN (data sebaran informasi terlampir).

Untuk mendukung indikator kinerja persentase masyarakat yang terpapar Informasi P4GN maka dilakukan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN.

Informasi dan Edukasi P4GN merupakan suatu kegiatan penyebaran informasi tentang P4GN yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh pengetahuan, menimbulkan sikap kesadaran, dan akhirnya berubah perilakunya untuk menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sasaran dalam Pengelolaan Informasi & Edukasi P4GN di BNN Kota Surabaya dengan total 28 informasi dengan rincian Informasi & Edukasi P4GN sebagai berikut :

1. Informasi & Edukasi P4GN melalui Talkshow sebanyak 3 kali dengan sasaran masyarakat yaitu Ketua LPMK 150 Kelurahan Kota Surabaya.
2. Informasi & Edukasi P4GN melalui Kampanye/Pagelaran Seni sebanyak 1 kali dengan tema Puncak Penganugerahan Award Surabaya Bersinar tahun 2020 dengan menampilkan Lagu Kreasi dan Yel-Yel Suroboyo Wani Lawan Narkoba, Parade Musik Patrol, Tarian Daerah dan Line Dance dengan sasaran 63 orang.
3. Informasi & Edukasi P4GN melalui Insert Konten sebanyak 2 kali dengan ikut berpartisipasi pada kegiatan Pertunjukan Rakyat yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
4. Informasi & Edukasi P4GN melalui Media Cetak sebanyak 3 kali yaitu Koran Memorandum, Radar Surabaya dan Surabaya Pagi
5. Informasi & Edukasi P4GN melalui Media Luar Ruang yaitu berupa penggantian pesan billboard di 6 titik, yakni di Kupang Indah, pintu masuk jembatan Suramadu, Samsat Manyar, Kelurahan Benowo, Jl. Imam Bonjol dan dekat Kemenag Surabaya.
6. Informasi & Edukasi P4GN melalui Media Radio sebanyak 5 kali yaitu Radio EBS, Sonora, Mercury, DJ, dan MTB FM. Kelima radio tersebut radio yang rata-rata pendengarnya dari kaum pemuda dan dikenal masyarakat Surabaya.
7. Informasi & Edukasi P4GN melalui Media TV Daerah sebanyak 2 kali yaitu berupa dialog interaktif di Metro TV dan Inews TV
8. Informasi & Edukasi P4GN melalui Media Online sebanyak 9 kali yaitu :
www.memorandum.co.id (2x), www.lenteratoday.com, www.harianbhirawa.com,
www.timesjatim.com, www.petisi.co, www.beritalima.com,
www.wartatransparansi.com, www.realita.co .

Berikut tabel target dan capaian persentase masyarakat yang terpapar Informasi P4GN tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya :

Tabel 1.1.1

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Satuan
1	2018	6	10,57	176,16	Persen
2	2019	7	53,71	767,28	Persen
3	2020	7	8,59	122,7	Persen

Faktor pendukung dalam mencapai kinerja persentase masyarakat yang terpapar Informasi P4GN adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
2. Kemampuan menyediakan bahan yang menarik dan bermutu sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan khalayak sasaran dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

Faktor hambatan dalam pelaksanaan mencapai kinerja persentase masyarakat yang terpapar Informasi P4GN antara lain :

1. Terjadinya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan yang awalnya harus tatap muka, sebagian dialihkan menjadi virtual/daring maka menjadikan kurang maksimal dalam mencapai outcome yang diharapkan.
2. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang digunakan dalam operasional pelayanan informasi dan edukasi P4GN bidang pencegahan, baik perlengkapan maupun sumberdaya personil dan pelatihan bagi petugas.

2	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kebijakan Institusi / Lembaga yang Responsif dalam Penanganan Permasalahan Narkoba
----------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2020 sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1	Jumlah Institusi / Lembaga yang Responsif terhadap Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba	2	6	300%

Dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2020 terdapat indikator kinerja Jumlah Institusi / Lembaga yang Responsif terhadap Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba. Target nasional yang harus dicapai BNN Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) Institusi / Lembaga dan BNN Kota Surabaya dapat merealisasikan sebanyak 6 (enam) sebagaimana daftar nama Institusi / Lembaga tersebut dibawah. Institusi / Lembaga tersebut dari Lembaga Pendidikan SMP yang ada di Surabaya.

Untuk mendukung tercapainya indikator tersebut diatas, BNN Kota Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba kepada 20 lembaga yakni Lurah dan Kepala SMP yang ada di Surabaya.
2. Koordinasi dalam rangka Pengayaan Referensi Advokasi P4GN ke BNN Provinsi Jawa Timur oleh Pejabat dan Staf BNN Kota Surabaya.
3. Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba. Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 orang terdiri dari 18 Ketua RW dan 10 orang guru Bimbingan Konseling SMP yang ada di Surabaya. Dalam pelaksanaan kegiatan Asistensi selama 16 jam peserta diberikan materi : 1. Tehnik Presentase, 2. Narkotika dan Permasalahannya, 3. Materi Tehnik Komunikasi Efektif, 4. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Keluarga dan Pendidikan, 5. Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Penjelasan Relawan Anti Narkoba, 6 Rehabilitasi Narkoba dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Masyarakat, 7. Tehnik Pemanfaatan Media, 8 Materi Rencana Tindak lanjut.
4. Supervisi Pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pejabat / Staf BNN Kota Surabaya dengan melaksanakan kunjungan kepada peserta Asistensi untuk memastikan keberhasilan BNN Kota Surabaya dalam pelaksanaan Asistensi. Dari hasil supervisi dapat disimpulkan antara lain bahwa :
 - a. Terjalinnnya sinergitas antara lain diwujudkan melalui Perjanjian Kerjasama tentang P4GN antara BNN Kota Surabaya dengan lembaga peserta asistens, penerapan tata tertib tentang P4GN.
 - b. Sebagian peserta Asistensi telah melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri di lingkungannya masing-masing seperti mengadakan sosialisasi P4GN.

- c. Sebagian peserta telah membentuk Satgas Anti Narkoba di lingkungannya masing-masing dengan melibatkan guru maupun para siswa.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan asistensi dan supervisi tersebut, sedikinya terdapat 6 (enam) lembaga Pendidikan yang telah responsif terhadap kebijakan pembangunan anti Narkoba sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.1.1

No	Nama Institusi / Lembaga	Kriteria Institusi / Lemb. yg Responsif	Keterangan
1	SMP Negeri 25 Surabaya	1. Adanya Regulasi 2. Kegiatan P4GN 3. Kelompok Satgas / Relawan Anti Narkoba	Penerapan tata tertib sekolah terkait P4GN Telah dilakukan PKS ttg P4GN dg BNNK Surabaya Penyuluhan/Sosialisasi P4GN kepada para siswa Terbentuknya kel. Satgas / Relawan Anti Narkoba
2	SMP Negeri 26 Surabaya	1. Adanya Regulasi 2. Kegiatan P4GN 3. Kelompok Satgas / Relawan Anti Narkoba	Penerapan tata tertib sekolah terkait P4GN Telah dilakukan PKS ttg P4GN dg BNNK Surabaya Penyuluhan/Sosialisasi P4GN kepada para siswa Terbentuknya kel. Satgas / Relawan Anti Narkoba
3	SMP Negeri 28 Surabaya	1. Adanya Regulasi 2. Kegiatan P4GN 3. Kelompok Satgas / Relawan Anti Narkoba	Penerapan tata tertib sekolah terkait P4GN Telah dilakukan PKS ttg P4GN dg BNNK Surabaya Penyuluhan/Sosialisasi P4GN kepada para siswa Terbentuknya kel. Satgas / Relawan Anti Narkoba
4	SMP Negeri 40 Surabaya	1. Adanya Regulasi 2. Kegiatan P4GN 3. Kelompok Satgas / Relawan Anti Narkoba	Penerapan tata tertib sekolah terkait P4GN Telah dilakukan PKS ttg P4GN dg BNNK Surabaya Penyuluhan/Sosialisasi P4GN kepada para siswa Terbentuknya kel. Satgas / Relawan Anti Narkoba
5	SMP Negeri 42 Surabaya	1. Adanya Regulasi 2. Kegiatan P4GN 3. Kelompok Satgas / Relawan Anti Narkoba	Penerapan tata tertib sekolah terkait P4GN Telah dilakukan PKS ttg P4GN dg BNNK Surabaya Penyuluhan/Sosialisasi P4GN kepada para siswa Terbentuknya kel. Satgas / Relawan Anti Narkoba
6	SMP Unggulan Baitul Fatah Surabaya	1. Adanya Regulasi 2. Kegiatan P4GN 3. Kelompok Satgas / Relawan Anti Narkoba	Penerapan tata tertib sekolah terkait P4GN Telah dilakukan PKS ttg P4GN dg BNNK Surabaya Penyuluhan/Sosialisasi P4GN kepada para siswa Terbentuknya kel. Satgas / Relawan Anti Narkoba

Perbandingan target dan capaian Institusi / Lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan anti Narkoba tahun 2018-2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.1.2

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Satuan	Keterangan
1	2018	3	3	100%	Lembaga	Responsif
2	2019	3	3	100%	Lembaga	Responsif
3	2020	2	6	300%	Lembaga	Responsif

Faktor pendukung dalam mencapai kinerja antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepedulian Instansi Lembaga Pendidikan dan kelompok masyarakat yang tinggi terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
2. Ketersediaan tempat pelaksanaan kegiatan yang menarik dan ketersediaan anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Faktor hambatan dalam mencapai kinerja antara lain adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pandemi covid-19 sehingga kegiatan harus digeser waktunya dari awal tahun menjadi pada triwulan 3 sehingga mengakibatkan keterbatasan waktu bagi peserta asistensi untuk melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungannya.
2. Keterbatasan pelaksanaan kegiatan tatap muka di lingkungan masing-masing peserta kegiatan asistensi karena pandemi Covid-19.
3. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan P4GN di lingkungan peserta kegiatan asistensi.

3	<p>Sasaran Kegiatan :</p> <p>Terselenggaranya Penguatan Kapasitas pada Institusi dan Lingkungan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Narkoba</p>
----------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2020 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yakni :

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
3.1	Jumlah Instansi / Lingkungan yang Turut Berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	8	8	100%

Dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2020 terdapat indikator kinerja jumlah Instansi / Lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti Narkoba. Target nasional yang harus dicapai BNN Kota Surabaya

adalah 8 (delapan) Institusi / Lingkungan dan BNN Kota Surabaya dapat mencapai target tersebut. Daftar nama Institusi / Lingkungan sebagaimana tersebut dibawah dengan rincian terdiri dari 1 Instansi Pemerintah, 1 Lingkungan Swasta, 1 lingkungan Masyarakat dan 5 lingkungan Pendidikan.

Untuk mendukung tercapainya indikator tersebut diatas, BNN Kota Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di lingkungan pemerintah, dalam wujud kegiatan terdiri dari :
 - a. Pembinaan Teknis / Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNN Kota Surabaya dalam rangka Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Pemetaan Sasaran / Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba dengan sasaran peserta 30 orang dari perwakilan Lingkungan Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Masyarakat dan Lingkungan Pendidikan.
 - c. Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba Instansi Pemerintah, dengan sasaran peserta 20 orang dari perwakilan Pejabat/Staf Instansi Pemerintah yang ada di Surabaya dan Pemberdayaan melalui tes urine narkoba.
 - d. Monitoring dan Evaluasi dengan peserta Pejabat dan Staf BNN Kota Surabaya dengan hasil terdapat 8 (delapan) Institusi/Lingkungan yang berpartisipasi.
2. Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Dunia Usaha / Lingkungan Swasta, dalam wujud kegiatan Workshop Anti Narkoba dengan sasaran 20 orang Pejabat / Pegawai di lingkungan Swasta / perusahaan yang ada di Surabaya.
3. Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Masyarakat, dalam wujud kegiatan Workshop Anti Narkoba dengan sasaran 20 (dua puluh) orang terdiri 2 Pengurus PKK Kota Surabaya dan 18 Tim Penggerak PKK Kelurahan.
4. Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan, dalam wujud kegiatan Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan dengan sasaran 40 (empat puluh) orang guru Bimbingan Konseling dari 38 SMP Negeri dan 2 SMP Swasta yang ada di Kota Surabaya.

Dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis selama 16 jam peserta diberi materi oleh Pemateri : 1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya P4GN, 2. Group Dynamika dan Pengarahan Program, 3. Materi Pengetahuan Dasar Adiksi, Konseling,

dan Rehabilitasi, 4. Strategi Pencegahan Dalam Upaya P4GN, 5. Materi Aspek hukum dalam P4GN, 6. Pengembangan karakter individu sebagai penggiat anti narkoba, 7. Publik speaking, dan 8. materi Action Plan. Sedangkan dalam pelaksanaan Workshop peserta selama 8 (delapan) jam diberi materi : 1. Kebijakan P4GN, 2. Konseling, adiksi dasar dan rehabilitasi, 3. Aspek Hukum dari P4GN dan 4. Materi Rencana Aksi.

Setelah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba, pejabat/ Staf BNN Kota Surabaya memberikan dorongan kepada peserta untuk menindaklanjuti kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing. Dari hasil pemberian dorongan dan monitoring dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagian besar telah menindaklanjuti kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing antara lain Sosialisasi, tes urine, pembentukan Satgas Anti Narkoba, adanya perencanaan anggaran untuk mendukung P4GN, penyediaan sarana prasarana dan peserta telah peduli pada lingkungannya terhadap P4GN. Nilai interval 2,51-3,25, Nilai Interval Konversi 69,64, Nilai IKP 2,79 dengan nilai mutu B, Kriteria Mandiri.
2. Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Dunia Usaha / Lingkungan Swasta, dari peserta yang ada masih sebagian kecil yang telah menindaklanjuti kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing. Kegiatan antara lain Sosialisasi, Pembentukan Satgas Anti Narkoba, adanya perencanaan anggaran untuk mendukung P4GN, penyediaan sarana prasarana dan peserta telah peduli pada lingkungannya terhadap P4GN. Nilai Interval 2,51-3,25, Nilai Interval Konversi 68,21, Nilai IKP 2,73 dengan nilai mutu B, Kriteria Mandiri
3. Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Masyarakat, sebagian besar telah menindaklanjuti kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing antara lain Sosialisasi P4GN, Pembentukan Satgas Anti Narkoba, adanya perencanaan anggaran untuk mendukung P4GN, penyediaan sarana prasarana dan peserta telah peduli pada lingkungannya terhadap P4GN. Nilai interval 2,51-3,25, Nilai Interval Konversi 70,42, Nilai IKP 2,82 dengan nilai mutu B, Kriteria Mandiri
4. Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan, dari peserta yang ada masih sebagian kecil yang telah menindaklanjuti kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing. Kegiatan antara lain Sosialisasi P4GN, Pembentukan Satgas Anti

Narkoba, Perjanjian Kerja Sama tentang P4GN dengan BNN Kota Surabaya, adanya perencanaan anggaran untuk mendukung P4GN, penyediaan sarana prasarana dan peserta telah peduli pada lingkungannya terhadap P4GN. Nilai interval 2,51-3,25, Nilai Interval Konversi 67,17, Nilai IKP 2,69 dengan nilai mutu B, Kriteria Mandiri.

Perbandingan tingkat kemandirian masing-masing kelompok Institusi / Lingkungan secara keseluruhan peserta pemberdayaan penggiat anti Narkoba selama tiga tahun terakhir (2018 – 2020) dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.1.1

No	Institusi / Lembaga	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Skala	IKP	Mutu. Kem	Skala	IKP	Mutu. Kem	Skala	IKP	Mutu. Kem
1	Instansi Pemerintah	2,51-3,25	3,10	Mandiri	2,51-3,25	3,21	Mandiri	2,51-3,25	2,79	Mandiri
2	Lingk. Swasta	2,51-3,25	2,90	Mandiri	2,51-3,25	2,95	Mandiri	2,51-3,25	2,73	Mandiri
3	Lingk. Masyarakat	3,25-4,00	3,70	Sgt Mndr	3,25-4,00	3,75	Sgt Mndr	2,51-3,25	2,82	Mandiri
4	Lingk. Pendidikan	3,25-4,00	3,65	Sgt Mndr	3,25-4,00	3,75	Sgt Mndr	2,51-3,25	2,69	Sgt Mandiri

Dari Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba 4 (empat) kelompok Institusi / Lingkungan tersebut, terdapat 8 Institusi / Lingkungan telah mandiri dalam partisipasi program pemberdayaan Anti Narkoba sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 3.1.2

No	Nama Institusi / Lingkungan	Kriteria Institusi / Lingkungan Turut Berpartisipasi	IKP		Keterangan
			Per Lemb	Rata2	
1	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	1. Aspek manusia 2. Aspek metode 3. Aspek Anggaran 4. Aspek Sistem 5. Aspek Sarpras 6. Aspek Kegiatan	3,62	3,62	Penggiat, Syaifuddin Z. dan Satgas Penyuluhan/Sosialisasi P4GN Pendanaan P4GN Peraturan/Kebijakan Sarpras yg mendukung P4GN Rehabilitasi Lahgun Narkoba di PKM
2	PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri	1. Aspek manusia 2. Aspek metode 3. Aspek Anggaran 4. Aspek Sistem 5. Aspek Sarpras 6. Aspek Kegiatan	3,43	3,43	Penggiat, M. Khanafi dan Satgas Sosialisasi P4GN, pasang Spanduk Pendanaan P4GN Peraturan/Kebijakan Sarpras yg mendukung P4GN Razia Lahgun Narkoba di Perusahaan

No	Nama Institusi / Lingkungan	Kriteria Institusi / Lingkungan Turut Berpartisipasi	IKP		Keterangan
			Per Lemb	Rata2	
3	PKK Kelurahan Bubutan Surabaya	1. Aspek manusia 2. Aspek metode 3. Aspek Anggaran 4. Aspek Sistem 5. Aspek Sarpras 6. Aspek Kegiatan	3,33	3,33	Penggiat, Prihatintiyas C R. dan Satgas Sosialisasi / Penyuluhan P4GN Pendanaan P4GN Peraturan/Kebijakan Sarpras yg mendukung P4GN Fasilitasi Rehabilitasi Lahgun
4	SMPN 3 Sby	1. Aspek manusia	3,33	3,30	Penggiat, dan Satgas Sosialisasi P4GN, pasang Spanduk Pendanaan P4GN Peraturan/Kebijakan Sarpras yg mendukung P4GN Melaksanakan PKS dengan BNNK Sby
5	SMPN 21 Sby	2. Aspek metode	3,29		
6	SMPN 37 Sby	3. Aspek Anggaran	3,29		
7	SMPN 50 Sby	4. Aspek Sistem	3,29		
8	SMPN 52 Sby	5. Aspek Sarpras	3,29		
		6. Aspek Kegiatan			
Nilai Rata-rata Kemandirian			3,42	Sangat Mandiri	

Berikut tabel target dan capaian indikator Institusi / Lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan Anti Narkoba pada tahun 2018 - 2020 :

Tabel. 3.1.3

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Satuan	Keterangan
1	2018	4	4	100%	Institusi/Lembaga	Mandiri
2	2019	8	8	100%	Institusi/Lembaga	Mandiri
3	2020	8	8	100%	Institusi/Lembaga	Mandiri

Faktor pendukung dalam mencapai kinerja antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepedulian Instansi Pemerintah dan kelompok masyarakat yang tinggi terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
2. Ketersediaan tempat pelaksanaan kegiatan yang menarik dan ketersediaan anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Faktor hambatan dalam mencapai kinerja antara lain adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pandemi covid-19 sehingga kegiatan harus digeser dari awal tahun menjadi pada triwulan 3 yang mengakibatkan keterbatasan waktu bagi peserta Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba untuk melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing.
2. Keterbatasan pelaksanaan kegiatan tatap muka di lingkungan masing-masing peserta kegiatan Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba karena pandemi Covid-19.

3. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan P4GN di lingkungan peserta kegiatan Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba.

4	<p>Sasaran Kegiatan :</p> <p>Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Narkoba pada Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah yang Memadai</p>
----------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2020 yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.1	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	2 Fasilitas	2 Fasilitas	100%

Capain indikator kinerja Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional ini dapat ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) Instansi Pemerintah yang mampu melayani rehabilitasi bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan narkotika dan/atau Pecandu Narkotika dalam rangka menghilangkan ketergantungan narkotika. Instansi Pemerintah tersebut adalah Rehabilitasi Sosial BNN Kota Surabaya dan RS Jiwa Menur Surabaya. RS Jiwa Menur Surabaya selain mampu melayani layanan rehabilitasi narkotika juga telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan BNN Kota Surabaya dalam hal layanan rehabilitasi narkotika. Selain 2 (dua) Instansi tersebut terdapat juga beberapa PKM yang mampu melayani rehabilitasi Narkoba antara lain PKM Jagir, PKM Sawahan, PKM Manukan Kulon, PKM Kalirungkut, PKM Dupak, PKM Gayungan dan Rumkital dr. Ramelan, namun sasaran indikator kinerja difokuskan terhadap Rehabilitasi Sosial BNN Kota Surabaya dan RS Jiwa Menur Surabaya.

Dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi narkotika ada dua jenis layanan yakni rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Dalam proses rehabilitasi rawat jalan, klien diberikan layanan asesmen sekali oleh Asesor dan dilanjutkan konseling oleh konselor sekurang-kurangnya seminggu sekali sebanyak 8 s/d 10 kali pertemuan atau adanya perubahan prilaku klien yang menjadi lebih baik. Bila klien dinyatakan selesai program, konselor / asesor akan memberikan saran kepada klien untuk mengikuti program pascarehabilitasi. Sedangkan proses rehabilitasi rawat inap, klien harus mengingat di

tempat rehabilitasi selama 3-6 bulan dan harus menjalani berbagai macam program antara lain : detoxifikasi, konseling individu, konseling bersama, FGD, latihan bersosial, penerimaan materi oleh para pemateri dan lain-lain sesuai standar nasional yang diterapkan oleh lembaga rehabilitasi.

Pada tahun 2020 Rehabilitasi Sosial BNN Kota Surabaya telah mampu memberikan layanan rehabilitasi rawat jalan sebanyak 47 klien yang dibiayai dengan DIPA BNN Kota Surabaya dan sebanyak 47 klien tanpa didukung DIPA, sedangkan RS Jiwa Menur Surabaya telah mampu memberikan layanan rehabilitasi rawat inap sebanyak 36 orang dan rawat jalan ruwatan metadone sebanyak 11 orang dengan DIPA BPJS PBI atau tanpa didukung DIPA (klien biaya mandiri). Berikut tabel layanan rehabilitasi pada Instansi Pemerintah yang menjadi target indikator :

Tabel 4.1.1

No	Nama Fasilitas	Jumlah Klien Yg diberikan Layanan Rehabilitasi		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Rehabilitasi Sosial BNNK Surabaya	-	-	47 Klien
2	Rumkital dr. Ramelan	29 Klien	10 Klien	Tidak PKS
3	RS Jiwa Menur	Tidak PKS	Tidak PKS	47 Klien

Dalam rangka mendukung keberhasilan indikator jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional, BNN Kota Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan antara lain :

1. Bimbingan Teknis Layanan dan fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan peningkatan mutu layanan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh LRIP sesuai dengan petunjuk teknis Standar Nasional.
2. Rapat Koordinasi tingkat Kota Surabaya, dengan tujuan menyamakan persepsi layanan rehabilitasi yang berstandar nasional.

Berikut tabel perbandingan target dan capaian indikator Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional pada tahun 2018 - 2020 :

Tabel 4.1.2

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Satuan	Keterangan
1	2018	2	2	100%	Fasilitas	Telah terlaksana layanan rehabilitasi
2	2019	1	1	100%	Fasilitas	Telah terlaksana layanan rehabilitasi
3	2020	2	2	100%	Fasilitas	Telah terlaksana layanan rehabilitasi

Beberapa manfaat fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional, antara lain :

1. Masyarakat mengetahui tempat layanan rehabilitasi Narkoba.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat melapor ke BNN Kota Surabaya atau ke tempat rehabilitasi instansi pemerintah dengan cara voluntary/ sukarela.
3. Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan dan atau Pecandu Narkotika akan mudah mengakses layanan rehabilitasi narkotika.

Faktor pendukung dalam mencapai kinerja antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kepedulian Pemerintah yang tinggi terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan dibentk layanan rehabilitasi narkoba
2. Ketersediaan tempat pelaksanaan layanan rehabilitasi milik pemerintah yang memadai sehingga klien mudah untuk menjangkau.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja antara lain adalah :

1. Proses perijinan klinik pratama BNN Kota Surabaya mengalami banyak kendala sehingga dibentuk Yayasan Rehabilitasi Sosial Pratama Surabaya.
2. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai di beberapa LRIP.
3. Terjadinya wabah Covid-19 sehingga pelaksanaan layanan rehabilitasi harus menyesuaikan kondisi dan waktu.

Strategi kedepan dalam mengatasi kendala pelaksanaan indikator fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional antara lain :

1. Segera melaksanakan koordinasi dengan lembaga / instansi terkait percepatan perijinan Klinik Pratama BNN Kota Surabaya.
2. Mempertimbangkan kembali kesediaan anggaran klinik BNN Kota Surabaya.
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait agar PKM yang ada dapat melaksanakan layanan rehabilitasi lebih baik dan berkualitas.
4. Melakukan evaluasi dan berkoordinasi atas kendala yang dihadapi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan seperti yang telah ditentukan.

5	Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Narkoba pada Fasilitas Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang Memadai
----------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut perlu adanya indikator kinerja yang

dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2020 yakni sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.1	Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Milik Komponen Masyarakat yang Operasional	4 Fasilitas	5 Fasilitas	125 %

Capain indikator kinerja Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional ini ditunjukkan adanya 5 komponen masyarakat yang yang mampu melayani rehabilitasi bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan narkoba dan/atau Pecandu Narkoba dalam rangka menghilangkan ketergantungan narkoba dan telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan BNN Kota Surabaya dalam hal peningkatan mutu layanan rehabilitasi narkoba. Rehabilitasi komponen masyarakat tersebut adalah Klinik Modern Dasa Medika, Yayasan Bambu Nusantara, Yayasan Plato Foundation, Yayasan Orbit dan Yayasan Rumah Bersinar Surabaya.

Dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi narkoba ada dua jenis layanan yakni rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Dalam proses rehabilitasi rawat jalan, klien diberikan layanan asesmen sekali oleh Asesor dan dilanjutkan konseling oleh konselor sekurang-kurangnya seminggu sekali sebanyak 8 s/d 10 kali pertemuan atau adanya perubahan perilaku klien yang menjadi lebih baik. Bila klien dinyatakan selesai program, konselor / asesor akan memberikan saran kepada klien untuk mengikuti program pascarehabilitasi. Sedangkan proses rehabilitasi rawat inap, klien harus menginap selama 3-6 bulan di tempat rehabilitasi dan harus menjalani berbagai macam program antara lain : konseling individu, konseling bersama, FGD, latihan bersosial, penerimaan materi oleh para pemateri dan lain-lain sesuai standar nasional yang diterapkan oleh pelaksana layanan rehabilitasi.

Pada tahun 2020 jumlah klien yang diberikan layanan oleh Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat sebanyak 370 klien, dengan rincian 1 klien dilayani oleh Klinik Modern Dasa Medika, 65 klien dilayani oleh Yayasan Bambu Nusantara, 127 klien dilayani oleh Yayasan Plato Foundation, 160 klien dilayani oleh Yayasan Orbit dan 17 klien dilayani oleh Yayasan Rumah Bersinar Surabaya. Dalam pelaksanaan rehabilitasi, klien tersebut ada yang rawat inap dan ada juga yang rawat jalan dengan biaya DIPA Kementerian Sosial atau biaya mandiri. Berikut tabel layanan rehabilitasi pada

Komponen Masyarakat yang menjadi target indikator kinerja :

Tabel 5.1.1

No	Nama Fasilitas / Lembaga Komponen Masyarakat	Jumlah Klien Yg diberikan Layanan Rehabilitasi		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Klinik Modern Dasa Medika	50 Klien	50 Klien	1 Klien
2	Yayasan Bambu Nusantara	85 Klien	125 Klien	25 Klien
3	Yayasan Plato Foundation	187 Klien	165 Klien	127 Klien
4	Yayasan Orbit Surabaya	221 Klien	395 Klien	160 Klien
5	Yayasan Rumah Bersinar Surabaya	Belum PKS	Belum PKS	17 Klien

Dalam rangka mendukung keberhasilan indikator jumlah fasilitas rehabilitasi milik Komponen Masyarakat yang operasional, BNN Kota Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan antara lain :

1. Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan peningkatan mutu layanan rehabilitasi yang dilaksanakan agar sesuai dengan petunjuk teknis Standar Nasional.
2. Rapat Koordinasi tingkat Kota Surabaya, dengan tujuan menyamakan persepsi layanan rehabilitasi yang berstandar nasional.
3. Verifikasi Lembaga rehabilitasi atas kelayakan dan legalitas pendirian lembaga rehabilitasi komponen masyarakat
4. Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan layanan rehabilitasi.

Berikut tabel perbandingan target dan capaian indikator Jumlah fasilitas rehabilitasi Komponen Masyarakat yang operasional pada tahun 2018 - 2020 :

Tabel 5.1.2

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Satuan	Keterangan
1	2018	4	4	100%	Fasilitas	Telah melayani rehabilitasi narkotika
2	2019	4	4	100%	Fasilitas	Telah melayani rehabilitasi narkotika
3	2020	4	5	125%	Fasilitas	Telah melayani rehabilitasi narkotika

Beberapa manfaat fasilitas rehabilitasi milik Komponen Masyarakat yang operasional, antara lain :

1. Masyarakat mengetahui tempat layanan rehabilitasi Narkoba.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat melapor ke BNN Kota Surabaya atau ke tempat rehabilitasi Komponen Masyarakat dengan cara voluntary/ sukarela.

3. Meningkatnya perhatian lembaga rehabilitasi komponen masyarakat terhadap Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba untuk memberikan dan mendorong mengikuti layanan rehabilitasi.

Faktor pendukung dalam mencapai kinerja antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kepedulian kelompok masyarakat yang tinggi terhadap Penyalah guna / Korban Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkoba sehingga terbentuknya layanan rehabilitasi narkoba Komponen Masyarakat
2. Ketersediaan tempat pelaksanaan layanan rehabilitasi milik komponen masyarakat yang memadai sehingga klien mudah untuk menjangkau.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja antara lain adalah :

1. Terjadinya wabah Covid-19 sehingga pelaksanaan layanan rehabilitasi harus menyesuaikan kondisi dan waktu.
2. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai dan kompeten.

Strategi kedepan dalam mengatasi kendala pelaksanaan indikator fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional antara lain :

1. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga / instansi terkait agar pelaksanaan layanan rehabilitasi lebih berkwaitas.
2. Melakukan evaluasi dan berkoordinasi atas kendala yang dihadapi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan seperti yang telah ditentukan standarnya.
3. Mendorong kepada BNN Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan pelatihan asesmen maupun konseling bagi pelaksana layanan rehabilitasi.

6	Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Pelayanan Pascarehabilitasi Narkoba yang Terintegrasi dan Berkesinambungan
----------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2020 yakni sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.1	Jumlah Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika yang Menjalani Layanan Pascarehabilitasi	20 Orang	20 Orang	100%

Capain indikator kinerja Jumlah Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika yang Menjalani Layanan Pascarehabilitasi ditunjukkan adanya 20 (dua puluh) klien telah mengikuti program Pascarehabilitasi. Klien Pascarehabilitasi adalah para Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika yang telah selesai mengikuti program rehabilitasi narkoba rawat jalan maupun rawat jalan.

Dalam rangka mendukung keberhasilan indikator kinerja tersebut, BNN Kota Surabaya telah menunjuk dan mengangkat 1 (satu) orang Petugas Pascarehabilitasi dan membentuk 5 (lima) kelompok Agen Pemulihan. Petugas Pascarehabilitasi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala pelaksanaan Pascarehabilitasi.

Pada tahun 2020 BNN Kota Surabaya mempunyai target 20 (dua puluh) orang Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika yang Menjalani Pascarehabilitasi. BNN Kota Surabaya berhasil mencapai target tersebut dengan dikelompokkan menjadi 5 (lima) agen Pemulihan yakni :

- a. 8 orang peserta terbagi 2 agen pemulihan di Kelurahan Mojo Kec. Gubeng dan
- b. 12 orang peserta terbagi 3 agen pemulihan di Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari.

Adapun kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika yang Menjalani Pascarehabilitasi antara lain :

1. Pemantauan. Peserta diberikan buku rapor yang dipantau oleh masing-masing agen pemulihan dan dikontrol oleh Petugas Pascarehabilitasi.
2. Pendampingan. Peserta didampingi oleh masing-masing agen pemulihan agar dapat terkontrol proses Pascarehabilitasi.
3. Bimbingan Lanjut. Peserta diberikan bimbingan agar mampu hidup lebih baik, dilakukan tes urine narkoba serta diukur kualitas kehidupan sehari-harinya.

Berikut perbandingan jumlah Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika yang menjalani Pascarehabilitasi dan tidak menjalani Pascarehabilitasi tahun 2018-2020 yang didukung DIPA BNN Kota Surabaya :

Tabel 6.1.1

No	Tahun Anggaran	Klien Yang Menjalani Rehabilitasi (DIPA)		Keterangan
		Layanan Rehabilitasi	Layanan Pascarehabilitasi	
1	2018	79 Orang	-	Tidak ada Prog. Pascarehabilitasi
2	2019	60 Orang	-	Tidak ada Prog. Pascarehabilitasi
3	2020	47 Orang	20 Orang	

Berikut tabel perbandingan target dan capaian indikator Jumlah Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika yang Menjalani Pascarehabilitasi pada tahun 2018 - 2020 :

Tabel 6.1.2

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Satuan	Keterangan
1	2018	0	0	0%	Orang	Belum mendapatkan target
2	2019	0	0	0%	Orang	Belum mendapatkan target
3	2020	20	20	100%	Orang	

Beberapa manfaat Jumlah Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika yang Menjalani Layanan Pascarehabilitasi, antara lain :

1. Masyarakat mengetahui pentingnya layanan pascarehabilitasi Narkoba.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat hususnya Penyalah guna narkoba untuk melapor ke BNN Kota Surabaya atau ke tempat rehabilitasi.

Faktor pendukung dalam mencapai kinerja antara lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya kepedulian kelompok masyarakat yang tinggi terhadap Penyalah guna / Korban Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkoba untk menjalani rehabilitasi yang berkesinambungan.
2. Adanya dukungan Pemerintahan di tingkat kelurahan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pascarehabilitasi dengan membentuk agen pemulihan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja antara lain adalah :

1. Terjadinya wabah Covid-19 sehingga pelaksanaan layanan rehabilitasi harus menyesuaikan kondisi dan waktu.
2. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai dan kompeten.

Strategi kedepan dalam mengatasi kendala Jumlah Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika yang Menjalani Layanan Pascarehabilitasi antara lain :

1. Mendorong kepada penyalah guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi agar berkenan melanjutkan program Pascarehabilitasi

- Melaksanakan sosialisasi program rehabilitasi berkesinambungan melalui media online, media cetak, brosur, iklan, Sosialisasi / tatap muka atau melalui peran seksi Pencegahan dan Dayamas maupun Pemberantasan.

7 Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2020 yakni jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P-21) dengan target capaian 2 (dua) berkas perkara.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
7.1	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P-21)	2 Berkas	9 Berkas	450%

Capaian indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P-21) dapat ditunjukkan dengan adanya jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P-21) sebanyak 9 berkas perkara dari target sebanyak 2 berkas. Selain 9 (sembilan) berkas perkara tersebut terdapat 3 (tiga) berkas yang dilimpahkan kepada Polsek yang ada di Surabaya.

Salah satu upaya yang dilakukan BNN Kota Surabaya dalam mengatasi permasalahan narkotika di Kota Surabaya adalah mengurangi suplai narkotika dengan cara memutus jaringan peredaran gelap narkotika antara lain dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika. Berikut beberapa dampak kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika antara lain :

- Mengetahui setiap pola perubahan jaringan peredaran narkotika di wilayah Kota Surabaya dan diikuti pemutusan jaringan didalamnya;
- Dengan adanya pemutusan jaringan maka diharapkan mampu memiskinkan pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran jaringan narkotika;
- Mampu menentukan dan mengambil kebijakan lebih lanjut terkait giat penyelidikan dan penyidikan baik dalam ranah preventif, repressif dan kuratif sesuai dengan tugas pokok fungsi Seksi Pemberantasan.

Berikut data kasus tindak pidana narkoba BNN Kota Surabaya tahun 2020 :

Tabel. 7.1.1

NO	BULAN	2020									KET
		JML KASUS	BER KAS	P-21	JML TSK		BARANG BUKTI NARKOTIKA				
					L	P	SABU (gr)	EKSTASI (btr)	GANJA (gr)	JARKOBA LAIN	
1	JANUARI										
2	FEBRUARI	6	6		6		119,35				BNNK SBY
3	MARET	2	2	7	2		12,53				BNNK SBY
4	APRIL			1							
5	MEI	1			1		6,26				LIMPAH POLSEK
6	JUNI										
7	JULI										
8	AGUSTUS	1	1	1	1		1,98				BNNK SBY
9	SEPTEMBER										
10	OKTOBER	1			1		4,12				LIMPAH POLSEK
11	NOVEMBER	1			1		2,82				LIMPAH POLSEK
12	DESEMBER										
	JUMLAH	12	9	9	12	0	147,06	0	0	0	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa BNN Kota Surabaya selama tahun anggaran 2020 telah menangani sebanyak 12 laporan kasus narkoba. Dari 12 kasus tindak perkara narkoba tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 12 berkas perkara telah ditangani, 9 (sembilan) berkas telah terselesaikan (P-21) ditangani oleh BNN Kota Surabaya dan 3 (tiga) berkas dilimpahkan ke polsek yang ada di Surabaya.

Kendala dalam mencapai indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang diselesaikan (P-21) antara lain :

1. Bahwa Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, yang berdampak jumlah peredaran gelap narkoba tinggi, namun dukungan anggaran, sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kondisi lapangan;
2. Pola peredaran jaringan yang senantiasa berubah dengan tidak mengenal perubahan waktu serta wilayah menyebabkan sulitnya menemukan dan memantau pola jaringan yang ada (adanya pola pemutusan jaringan);
3. Adanya indikasi bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan diantaranya mendapat *back up* atau dukungan dari para pemangku kepentingan sehingga

menyulitkan petugas untuk melakukan penyelidikan di lapangan;

4. Pengembangan sumber daya manusia di seksi pemberantasan belum maksimal sehingga diperlukan adanya bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dari pembina fungsi.
5. Upaya untuk melakukan penyelidikan dengan berbasis teknologi yang pada hakekatnya dapat mempermudah petugas dalam menemukan dan menganalisa jaringan belum dapat dilakukan karena kendala teknis dan prosedural serta minimnya pengetahuan petugas dalam pengaplikasian ilmu sebagaimana yang dimaksud.

Perbandingan dengan kegiatan pada tahun 2019 antara lain :

1. Bahwa giat penyelidikan dalam kurun waktu 2020 lebih koordinatif, jelas dan terarah dengan tetap berpedoman pada giat penyelidikan lalu yang telah dilakukan;
2. Bahwa target jaringan 2020 lebih beragam yang diikuti dengan pendekatan penyelidikan yang lebih variatif pula;
3. Bahwa tahun 2020 kegiatan seksi pemberantasan BNN Kota Surabaya lebih fokus terhadap pencapaian target yaitu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2017-2020 digambarkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 7.1.1 Jumlah Kasus yang terselesaikan

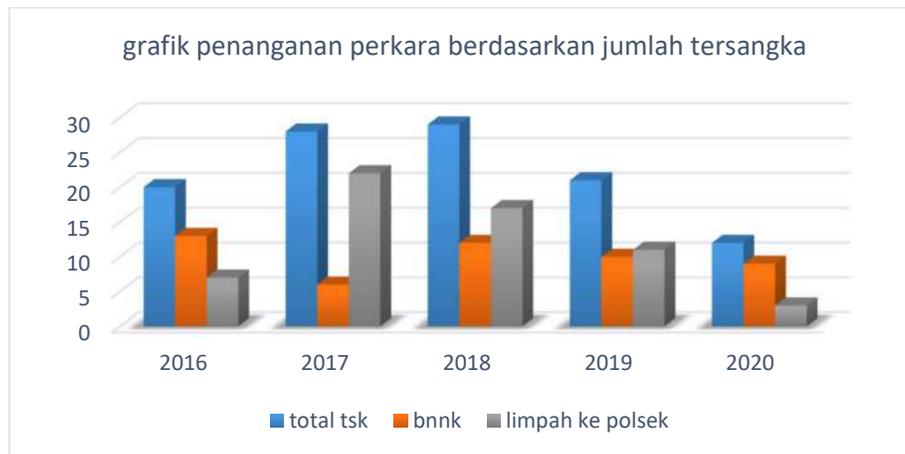


Kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika yang telah dilakukan BNN Kota Surabaya seharusnya lebih dapat dilakukan secara maksimal mengingat fokus kegiatan penyelidikan yang dilakukan selama ini hanya berbasis informasi di lapangan saja sehingga perlu didukung oleh informasi berbasis teknologi

dimana hasil penyelidikan petugas terhadap jaringan nantinya diharapkan mampu memiliki nilai akurasi yang relevan dalam rangka penentuan kebijakan dan langkah kegiatan berikutnya.

Berikut grafik perbandingan penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan jumlah tersangka.

Grafik 7.1.2



Jumlah barang bukti yang diamankan oleh BNN Kota Surabaya dalam mencapai indikator kinerja pada tahun 2018-2020 dapat disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel : 7.1.1

No	Tahun ANggaran	Barang Bukti			
		Sabu	Ekstasi	Ganja	Pil Koplo
1	2018	112,18 gram	7 butir	-	588.000 butir
2	2019	41,8 gram	-	838,76 gram	-
3	2020	147,06 gram	-	-	-

Berikut perbandingan capaian hasil indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel : 7.1.2

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Satuan
1	2018	2	12	600%	Berkas
2	2019	2	10	500%	Berkas
3	2020	2	9	450%	Berkas

**8 Sasaran Kegiatan :
Terselenggaranya Proses Manajemen Kinerja yang Efektif dan Efisien**

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2020 yakni sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
8.1	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88	85,86 %	97,57 %

Capain indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Surabaya dapat ditunjukkan adanya nilai kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2020 sebesar 85,86 dari target nilai 88% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 95,23 sebagaimana tertuang dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dashboard BNN Kota Surabaya pada Aplikasi SMART DJA Kemenkeu TA. 2020, sebagaimana tersebut pada grafik dibawah ini.

Sementara perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja BNN Kota Surabaya tahun 2018 - 2020 sebagaimana dsajikan pada tabel berikut :

Tabel : 8.1.1

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2018	87	85,80	98,62%	
2	2019	88	84,41	95,92%	
3	2020	88	85,86	97,57%	

Dalam rangka mendukung tercapainya indikator Nilai Kinerja BNN Kota Surabaya telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan berupa layanan manajemen keuangan dan layanan perkantoran
2. Layanan pengembangan organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia
3. Penyusunan dan pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN berupa layanan perencanaan dan layanan pemantauan dan evaluasi
4. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah tangga dan Pengelolaan sarana dan prasarana berupa layanan umum dan layanan perkantoran
5. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan BNN Kota Surabaya.

Grafik Smart...

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA
SURABAYA

TAHUNAN
LAPORAN TAHUN 2020
**KINERJA
ANGGARAN**

SmArt

Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
Kementerian Keuangan

LAPORAN KINERJA ANGGARAN

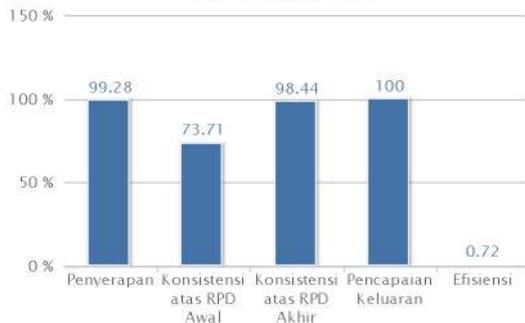
SATUAN KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA
TA 2020

Pencapaian Kinerja

85.86

Nilai kinerja Satker BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA sebesar **85.86** persen, merupakan hasil pengukuran aspek implementasi yang terdiri dari variabel:

Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran: 2020



1. Penyerapan anggaran sebesar **99.28** persen.
2. Konsistensi atas RPD (awal) sebesar **73.71** persen
3. Konsistensi atas RPD (akhir) sebesar **98.44** persen
4. Capaian keluaran sebesar **100.00** persen
5. Efisiensi sebesar **0.72** persen

1. Nilai Kinerja:

a. Penjelasan umum:

terjadi pandemi covid 19 sehingga mempengaruhi serapan anggaran pada semester I, sementara semester II melakukan revisi dan juga memperhatikan untuk melakukan revisi terkait percepatan penanganan covid 19 sesuai arahan dari pemerintah pusat

b. Rekomendasi:

merevisi kegiatan agar segera dapat terlaksana serta revisi untuk percepatan penanganan covid 19

2. Capaian keluaran:

a. Faktor Penghambat

terjadinya pandemi covid 19

b. Faktor Pendukung

melakukan revisi anggaran agar kegiatan dapat terlaksana sehingga dapat mencapai target keluaran (output)

c. Rekomendasi

percepatan pelaksanaan kegiatan setelah dilakukan revisi

3. Efisiensi:

a. Faktor Penghambat

tidak terdapat faktor penghambat

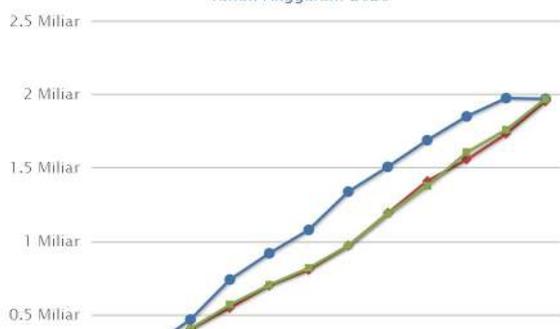
b. Faktor Pendukung

menerima penawaran dari penyedia barang dan jasa dan melakukan mempelajari setiap penawaran yang diajukan

c. Rekomendasi

Membandingkan serta memilih kualitas dan harga terbaik pada penawaran penyedia barang dan jasa

Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran: 2020



4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan:

a. Faktor Penghambat

terjadinya pandemi covid 19

b. Faktor Pendukung

Melakukan monev pada timeline yang telah dibuat

c. Rekomendasi

memperbaiki timeline sesuai situasi dan kondisi terutama saat pandemi covid 19 agar segera terlaksana kegiatan yang direncanakan

5. Penyerapan Anggaran:

a. Faktor Penghambat

Terjadinya pandemi Covid-19 menghambat pelaksanaan kegiatan baik pada seksi rehabilitasi, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta subag umum. Pada seksi rehabilitasi tidak dapat menyelesaikan konseling karena kegiatan tatap muka tidak dimungkinkan serta sulit menghubungi klien untuk melakukan kegiatan konseling online. Pada seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kegiatan tidak dapat dilakukan terkait kegiatan tatap muka serta akan terjadi pengumpulan masa. Sementara untuk subag umum kegiatan terhambat pada penyerapan anggaran operasional sehari-hari perkantoran, kegiatan pembinaan kepegawain serta kegiatan hubungan masyarakat

b. Faktor Pendukung

Adanya instruksi dari pusat untuk melakukan revisi anggaran pada pagu-pagu anggaran yang tidak terlaksana dan revisi untuk percepatan penanganan covid 19 hal ini mendukung BNN Kota Surabaya untuk segera bertindak menyikapi hambatan yang terjadi

c. Rekomendasi

melakukan revisi anggaran pada pagu-pagu anggaran yang tidak terlaksana dan revisi untuk percepatan penanganan covid 19 sesuai instruksi pemerintah pusat serta segera melaksanakan kegiatan

6. Lain-lain terkait kualitas pencapaian kinerja anggaran:

a. Faktor Penghambat

tidak terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi kualitas pencapaian kinerja anggaran

b. Faktor Pendukung

Adanya instruksi dari pusat untuk melakukan revisi anggaran pada pagu-pagu anggaran yang tidak terlaksana dan revisi untuk percepatan penanganan covid 19 hal ini mendukung BNN Kota Surabaya untuk segera bertindak menyikapi hambatan yang terjadi

c. Rekomendasi

melakukan revisi anggaran pada pagu-pagu anggaran yang tidak terlaksana dan revisi untuk percepatan penanganan covid 19 sesuai instruksi pemerintah pusat serta segera melaksanakan kegiatan

B. REALISASI ANGGARAN

Pada awal tahun anggaran BNN Kota Surabaya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.066.489.000,- sebagaimana tertuang dalam Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2020 nomor : SP DIPA-006.01.2.689601/2020 tanggal 12 November 2019 tentang DIPA TA 2020 BNN Kota Surabaya. Pada bulan April 2020 terdapat penghematan belanja sebesar Rp. 100.008.000,- sehingga anggaran menjadi Rp. 1.966.481.000,- Penghematan tersebut sebagaimana tertuang dalam SE Kepala BNN RI nomor : SE/44/IV/KA/PR.01/BNN/2020 tentang Penyesuaian / Penghematan Belanja dalam rangka Pelaksanaan APBN Tahun 2020 di Lingkungan BNN.

Realisasi anggaran BNN Kota Surabaya TA. 2020 sebesar Rp. 1.952.322.337,- atau sebesar 99,28% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.966.481.000,- dan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 14.158.663,- atau sebesar 0,72%. Sisa anggaran tersebut disebabkan antara lain : adanya efisiensi anggaran Swakelola, sisa penggunaan anggaran biaya operasional perkantoran seperti pembayaran langganan telpon, pembayaran langganan air maupun langganan listrik.

Berikut perbandingan Pagu / Anggaran dan Realisasi Anggaran BNN Kota Surabaya tahun anggaran 2018 – 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel : B.1

No	Tahun Anggaran	Pagu / Anggaran	Realisasi		Tdk Terserap	
			Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
1	2018	Rp. 2.045.424.000,-	2.008.682.534	98,20	36.741.466	1,80
2	2019	Rp. 1.736.502.000,-	1.723.992.213	99,28	12.509.787	0,72
3	2020	Rp. 1.966.481.000,-	1.952.322.337	99,28	14.158.663	0,72

Pagu anggaran BNN Kota Surabaya tersebut untuk mendukung tercapainya 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja yang terbagi dalam 2 (dua) program yakni :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang terdapat 7 (tujuh) sasaran kegiatan terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Target kinerja TA. 2020 BNN Kota Surabaya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja yang dikelompokkan dalam 2 (dua) program secara umum dapat tercapai secara maksimal dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan terdiri 1 (satu) indikator kinerja yakni “Nilai kinerja Anggaran BNN Kota Surabaya” dengan realisasi 85,86 dari target 88 atau capaian 97,57%.
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yakni :
 - a. Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN dengan capaian 122,7%
 - b. Jumlah Institusi / Lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti Narkoba dengan capaian 300%
 - c. Jumlah instansi / lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan Anti narkoba dengan capaian 100%
 - d. Jumlah fasilitas rehabilitasi milik Instansi pemerintah yang operasional dengan capaian 100%
 - e. Jumlah fasilitas rehabilitasi milik Komponen Masyarakat yang operasional dengan capaian 125%
 - f. Jumlah Penyalah guna, Korban Penyalah guna, dan Pecandu Narkoba yang Menjalani Layanan Pascarehabilitasi dengan capaian 100%
 - g. Jumlah berkas perkara tindak pidana Narkotika yang Diselesaikan (P-21) dengan capaian 450%

BNN Kota Surabaya akan meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik kepada pejabat atasan, instansi terkait dan lembaga-lembaga yang dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja BNN Kota Surabaya. Diharapkan pada tahun berikutnya BNN Kota Surabaya mendapatkan dukungan anggaran yang cukup dan memadai serta adanya peningkatan Sumber Daya Manusia yang lebih handal dan profesional sehingga seluruh pelaksanaan dan capaian sasaran kegiatan di BNN Kota Surabaya dapat lebih baik dan maksimal dibandingkan tahun sebelumnya. Perlu disampaikan pada tahun anggaran 2022 BNN Kota Surabaya sangat membutuhkan tambahan anggaran khususnya dalam hal perawatan gedung kantor BNN Kota Surabaya.

BAB V
LAMPIRAN - LAMPIRAN

- a. Perjanjian kinerja
- b. Data dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Lain-lain yang dianggap perlu.